

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Dwi, Kartikawati. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana, 2019.
- H.S, Salim. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Is, Muhammad Sadi, Lia Hartika, Windi Arista, Harniwati, Indriani Santi, dan Edwin Yuliska. *Hukum Perdata*. Kabupaten Badung: Intelektual Manifes Media, 2024.
- Jonaedi, Efendi, dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Muskibah. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Peter, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Riduan, Syahrani. *Seluk-Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*. Bandung: P.T. Alumni, 2006.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, 2017.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Siagian, Abdul Hakim. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima, 2020.
- Sri, Wahyuni, Masri Eshter, Rahayu Panti, dan Siswanto Heru. *Hukum Perikatan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Suyono, Yoyok Ucok. *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Thalib, Abd, dan Nur Aisyah T. *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Wijanarko, Dwi Seno, Gatot Efrianto, dan Sabela Gayo. *Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang & Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Pata, 2023.

JURNAL

- Budiansyah, Agus, Danu Suryani, dan Nyi Mas Gianti B. Erbiana. "Pengaturan Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha/Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Karimah Tauhid* 3, no. 8 (2024): 9060–9071.
- Farhan Jiddan Saros dan Nurkholis Anwar. "Efektivitas Asas *Pacta Sunt Servanda* Saat Terjadi Keadaan Memaksa (*Force majeure*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Journal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 88.
- Farhan Tsani dan Harti Yanti. "Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara." *Jurnal Sosial Teknologi* 6, no. 3 (2022): 773.
- Ira Kurnia Prasetya dan Mohammad Saleh. "Pengenaaan Sanksi Daftar Hitam bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Bisnis* 7, no. 2 (2023): 118.

- M. Arsyad Sanusi. "Perkembangan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dan Penerapannya dalam Praktik Peradilan." *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 2 (2018): 225.
- Masidah. "Evolusi Keadaan Memaksa (*Force majeure*) dalam Kerangka Hukum Kontrak Perjanjian di Indonesia." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 2 (2024): 52.
- Muhammad Fauzan. "Prinsip *Strict Liability* dan Perkembangannya dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 731.
- Muhammad Irfan Hilmy dan Muhammad Fadhali Yusuf. "Praktik dan Disparitas Putusan Hakim dalam Menetapkan *Force majeure* di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 164.
- Pane, Musa Darwin. "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 147–155.
- Patria, Nasridal. "Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 5, no. 1 (2021): 253–273.
- R. Setiawan. "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 412.
- Ridwan Khairandy. "Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Keperdataan." *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 58.
- Santoso, Agung Budi. "Pengaruh Luas Lahan dan Pupuk Bersubsidi terhadap Produksi Padi Nasional." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 20, no. 3 (2015): 208–212.
- Sari Anggoro dan Sunardi Nardi. "Analisis Strategi Pengadaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Ketersediaan dan Stabilitas Harga dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial* 2, no. 1 (2020): 3.
- Setiawan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep *Force majeure* Sebagai Alasan Pembebasan Tanggung Jawab dalam Hukum Kontrak." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 1100.
- Siti Kotijah. "Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 44.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017.
- Yati Nurhayati. "Unsur Kesalahan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (2017): 97.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor
4 Tahun 2021